

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan suatu daerah pada dasarnya merupakan target yang ingin dicapai oleh setiap pemimpin daerah. Namun, hal tersebut bukan perkara mudah karena ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Tidak hanya didukung oleh pemimpin yang baik tetapi sumber daya manusia yang baik juga menjadi faktor pendukung dalam hal merealisasikan kemajuan daerah. Tidak hanya itu, tetapi keuangan daerah yang baik dan pertumbuhan daerah yang baik juga perlu diperhatikan oleh pemimpin daerah, pemerataan daerah juga perlu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang baik pastinya akan membawa perubahan yang baik pula bagi masyarakatnya, seorang pemimpin harus lebih mengutamakan kepentingan daerah diatas kepentingan pribadi. Perubahan suatu daerah diperlukan karena akan banyak memberikan manfaat yang baik, tidak hanya bagi daerah itu sendiri tetapi juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Misalnya kemajuan suatu daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan dapat membantu masyarakat yang belum mendapat pekerjaan, sehingga hal tersebut dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan angka kemiskinan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur dan

mengurus masalah daerahnya sendiri diharapkan agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Namun begitu pemerintah daerah harus tetap menjalankan semua urusannya sesuai dengan asas ekonomi dan melalui peran masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip demokrasi, keadilan dan keistimewaan suatu daerah berdasarkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, efektivitas dan efisiensi sangat memerlukan banyak perbaikan yaitu dengan lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan hubungan antar susunan pemerintahan. Kebijakan otonomi daerah tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-undang tersebut memberikan dampak yang masuk akal bagi pemerintah daerah berupa perubahan asas-asas dalam mengatur hubungan antar pemerintahan daerah, hubungan keuangan daerah dan juga memberikan perubahan yang sangat penting dalam sistem pengelolaan pemerintah daerah. menyelenggarakan otonomi daerah selain merupakan perintah konstitusi namun juga sebagai kebutuhan objektif dalam menjalankan sistem pemerintahan saat ini. Proses penyelenggaraan otonomi daerah harus dapat membantu mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif sehingga semua potensi yang ada dan dimiliki oleh daerah dapat diberdayakan sesuai dengan kebutuhan daerah serta dapat membantu masyarakat dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan kemajuan

daerah. selain itu juga, pemerintah sangat memerlukan kewenangan dan kemampuan sehingga dapat lebih maksimal dalam menggali sumber keuangan daerah sendiri, tidak hanya itu namun harus didukung pula oleh perimbangan keuangan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah provinsi.

Kabupaten Bangka Tengah adalah Kabupaten hasil pemecahan dari Kabupaten Bangka yang dilakukan pada tahun 2003. Kabupaten Bangka Tengah menjadi salah satu pusat perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena disepanjang jalan raya Pangkalpinang-Koba (60 km) terdapat banyak sekali pantai-pantai indah yang tepat berada disisi jalan terutama di Desa Penyak dan Kurau. Tidak hanya sebagai pusat perikanan, tetapi keindahan dari pantai-pantai tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi daerahnya melalui bidang pariwisata sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi Kabupaten Bangka Tengah.

Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2003 Kabupaten Bangka Tengah terbentuk pada tanggal 25 Februari 2003, wilayah Kabupaten Bangka Tengah beradatepat di pulau Bangka. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah berbatasan langsung dengan beberapa daratan lainnya seperti wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Selatan. Keinginan masyarakat sekitar dan kesepakatan yang dibuat bersama menjadialasan pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, namun tidak hanya itu tetapi pembentukan juga dilakukan untuk membantu meningkatkan dan

mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik. Alasan lain pembentukan wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah untuk pengembangan dan peningkatan wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satu bagian terpenting yang mendukung dan membantu perekonomian Kabupaten Bangka Tengah adalah karena keberadaan salah satu perusahaan peleburan biji timah asal Malaysia dan telah ditutup sejak tahun 2013 silam. Keberadaan perusahaan peleburan biji timah itu sendiri membawa banyak perubahan terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah, perusahaan tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja asal Bangka Tengah, pasar ramai dan kehidupan lebih tenteram sehingga ekonomi masyarakat pun lebih baik pada saat itu. Namun, saat perusahaan peleburan timah tersebut ditutup membuat perekonomian masyarakat Kabupaten Bangka Tengah ikut melemah.

Sumber naik turunnya perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah bukan hanya sektor pertambangan tetapi sektor pertanian dan perikanan juga menjadi sumber pendapatan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Karena selain menjadi penambang timah, masyarakat juga bekerja sebagai petani dan nelayan. Oleh karena itu, sektor pertanian dan perikanan juga menjadi pemicu dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, sekarang ini masyarakat lebih dominan untuk menekuni sektor pertanian yaitu dengan menanam lada, dikarenakan timah yang semakin

menipis jumlahnya. Sehingga diharapkan lada mampu untuk mendongkrak kembali nilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah.

Pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas dan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh suatu wilayah yang mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu sehingga dapat dilihat seberapa jauh kegiatan dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut telah dilakukan. Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur dan melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah sehinggalah dari tingkat PDRB tersebut dapat memperlihatkan jumlah nilai tambah yang telah dihasilkan oleh seluruh aktivitas dan kegiatan produksi yang dilakukan dalam perekonomian di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran mengenai pencapaian yang didapat oleh daerah dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut adalah laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam faktor-faktor produksi yang terpilah menurut lapangan usaha. Ukuran tersebut tidak dapat secara langsung menggambarkan tingkat perubahan perekonomian yang terjadi. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif memberikan gambaran bahwa perekonomian mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun sebaliknya pertumbuhan yang negatif adalah gambaran bahwa perekonomian mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah tahun 2009-2016:

Gambar I.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Tengah Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Periode 2009-2016



Sumber: Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Kabupaten Bangka Tengah, 2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Tengah diukur dan dilihat dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Kabupaten Bangka aktivitas perekonomian di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan perkembangan yang baik setiap tahunnya, hal tersebut diindikasikan dari nilai PDRB ADHK yang terus mengalami peningkatan. Rata-rata kenaikan PDRB atas dasar harga konstan setiap tahunnya sekitar 200 miliar rupiah.

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Bangka tengah Selama kurun waktu 2010-2014 mengalami perlambatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya perusahaan swasta yang bergerak dibidang

pertambangan sudah tidak beroperasi lagi sejak pertengahan tahun 2013 dan menyebabkan perkembangan usaha pertambangan dan industri pengolahan mengalami penurunan yang cukup dalam. Kabupaten Bangka Tengah merupakan kabupaten ekonomi tambang yang terlihat dari peranan pertambangan dan industri pengolahan terhadap PDRB Bangka Tengah sekitar 40 persen. Selain itu, turunnya permintaan akan produk ekspor serta harga komoditi ekspor yang kurang baik juga mendorong melambatnya perkembangan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah seperti harga logam timah yang rendah. Nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 sebesar 4,5 triliun rupiah dan pada tahun 2014 mencapai 5,25 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2015 PDRB atas dasar harga konstan mencapai 5,27 triliun rupiah dan pada tahun 2016 mencapai 5,42 triliun rupiah.

Pada struktur APBD kabupaten/kota di Indonesia terdapat berbagai fakta dan kejadian yaitu pada sisi pendapatan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap peranan pemerintahan pusat. Tingginya proporsi tersebut mampu memberikan satu petunjuk bahwa posisi anggaran pusat sangat mempengaruhi pembangunan perekonomian suatu daerah. Semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah.

Upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang baik, pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat merupakan misi utama dari undang-undang tersebut, bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Proses pengalokasian Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam APBD ditujukan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, baik untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik menjadilah satu alasan dana-dana tersebut dialokasikan oleh pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya mengubah dan mempertimbangkan kembali komposisi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khususnya dalam upaya peningkatan dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Proses pengalokasian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan berbagai sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga dapat menikmati manfaat yang dihasilkan dari

pembangunan daerah. Terjadinya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan pula menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Berikut data Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bangka Tengah beberapa tahun terakhir

Tabel I.1 Data Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2009-2016

No	Tahun	Dana Alokasi Umum (Rp)	Dana Alokasi Khusus (Rp)
1.	2009	312.270.000.000	102.180.000.000
2.	2010	331.500.000.000	81.540.000.000
3.	2011	339.080.000.000	123.590.000.000
4.	2012	360.760.000.000	80.700.000.000
5.	2013	356.140.000.000	115.120.000.000
6.	2014	362.810.000.000	94.080.000.000
7.	2015	334.270.000.000	93.680.000.000
8.	2016	357.400.000.000	96.620.000.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 2018

Dapat dilihat dari tabel I.1 diatas bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Bangka Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun mengalami penurunan namun bukan penurunan yang besar, sehingga Kabupaten mempunyai kesempatan lebih luas lagi untuk memenuhi kebutuhan daerahnya serta untuk meningkatkan kualitas daerah dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah. Dengan tingginya angka penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) artinya Kabupaten Bangka Tengah dapat leluasa untuk mengatur daerahnya sendiri, dan membantu pemerintah

dalam mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah.

Dana Alokasi Umum tertinggi diterima oleh Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2009. Sedangkan Dana Alokasi Khusus tertinggi diterima oleh Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2012.

Adanya dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada pemerintahan daerah diharapkan mampu untuk mendanai seluruh kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi merupakan salah satu wujud dari perimbangan keuangan. Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari Dana Perimbangan yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Selain ketiga jenis dana tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan sumber dana bagi pemerintahan daerah yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah.

Dana perimbangan juga memiliki fungsinya masing-masing yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai penyeimbang fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari pajak yang dibagihasilkan. Dana Alokasi Umum berfungsi sebagai pemerata fiskal antar daerah di Indonesia dan dialokasikan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus dialokasikan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat.

Dana Alokasi Umum yang dialokasikan kepada suatu daerah otonom ditentukan berdasarkan dengan besar atau kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) yang dimiliki oleh suatu daerah otonom tersebut, selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) juga termasuk didalamnya. Dana Alokasi Umum yang dialokasikan kepada daerah yang mempunyai potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil maka akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif lebih kecil. Sebaliknya, jika daerah yang mempunyai potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif lebih besar. Sedangkan Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah yang dianggap sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan digunakan setiap tahunnya agar bisa mendapatkan pengalokasian Dana Alokasi Khusus. Untuk proses penentuan daerah yang dapat menerima Dana Alokasi Khusus yaitu harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria tertentu seperti kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus untuk masing-masing setiap daerah otonom ditentukan dan ditetapkan dengan melalui perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. (Mardiyanto dkk, 2009:44)

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pungky Siswiyanti (2015) dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening” mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus

(DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Nuraida Rizki Ardiyani (2017) dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2011-2015” menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan dari uraian dan penjelasan di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah Periode Tahun 2009-2016”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tentang Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah periode tahun 2009-2016 ?

3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah periode tahun 2009-2016 ?
4. Apakah Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah periode tahun 2009-2016 ?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah periode 2009-2016. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari data-data PDRB atas dasar harga konstan yang ada di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika Kabupaten Bangka Tengah, sedangkan Data yang berhubungan dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (SAP) Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini hanya akan meneliti sebatas Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi saja.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran tentang Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Tengah.

2. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah periode tahun 2009-2016.
3. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah periode tahun 2009-2016.
4. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah periode tahun 2009-2016.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah dan sebagai ilmu yang telah diperoleh semasa kuliah yaitu ilmu manajemen terkhusus manajemen keuangan.
 - b. Sebagai masukan empiris untuk pengembangan ilmu manajemen khususnya kajian manajemen keuangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Bagi civitas akademik, penelitian ini dapat menambah sumbangan informasi pemikiran dan kajian untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam usaha meningkatkan kualitas daerahnya serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Bagi penulis, penelitian ini sebagai pendalaman ilmu yang telah di dapatkan semasa kuliah sehingga dapat diaplikasikan pada kasus-kasus yang nyata.
- c. Bagi penulis selanjutnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah informasi dalam pengembangan penelitian selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional, yang meliputi populasi dan teknik pengambilan sampel, jenis data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskripsi objek penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga menguraikan tentang bagaimana pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi. Pembahasan masalah yang dilakukan atas analisis data-data yang dikumpulkan. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang ditetapkan berlandaskan teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu sehingga dapat menarik kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membantu pihak pemerintahan.